



Ketika Timur Tengah Bergejolak:

Dampak Geopolitik Energi
terhadap Ekonomi Indonesia

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Ketika Timur Tengah Bergejolak: Dampak
Geopolitik Energi terhadap Ekonomi Indonesia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

13 Maret 2026

KETIKA TIMUR TENGAH BERGEJOLAK: DAMPAK GEOPOLITIK ENERGI TERHADAP EKONOMI INDONESIA

Ketika Timur Tengah bergolak, yang terguncang bukan hanya peta diplomasi atau stabilitas keamanan kawasan, melainkan juga arsitektur ekonomi global. Dalam konteks energi, Timur Tengah bukan sekadar wilayah konflik, tetapi simpul vital dari sirkulasi minyak dan gas dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM menegaskan bahwa penutupan Selat Hormuz berpotensi mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak global, atau sekitar 20,1 juta barel per hari. Pada saat yang sama, IEA menyebut gangguan yang terjadi pada Maret 2026 sebagai disrupsi pasokan minyak terbesar dalam sejarah pasar minyak modern, dengan penurunan pasokan global sekitar 8 juta barel per hari pada bulan itu dan pelepasan cadangan strategis secara besar-besaran oleh negara-negara anggota. ([Kementerian ESDM RI](#))

Bagi Indonesia, persoalannya bukan sekadar apakah perang itu terjadi jauh dari Jakarta, Surabaya, Makassar, atau Medan. Persoalannya adalah bahwa ekonomi Indonesia masih berinteraksi sangat erat dengan harga energi global, kurs rupiah, biaya logistik, subsidi fiskal, dan rantai pasok bahan baku industri. Karena itu, gejolak Timur Tengah harus dibaca sebagai guncangan berlapis: ia menyentuh harga impor, inflasi, APBN, kestabilan rupiah, daya beli masyarakat, sampai ke hilirisasi industri

seperti nikel. Dengan kata lain, krisis energi global segera berubah menjadi persoalan domestik yang sangat konkret. ([Reuters](#))

Indonesia sebenarnya memasuki 2026 dari posisi yang tidak rapuh. Dalam publikasi APBN Kita Februari 2026, pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, dengan pertumbuhan kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen. Untuk 2026, APBN dibangun dengan asumsi pertumbuhan 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, kurs Rp16.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia sekitar USD70 per barel. Pada saat yang sama, realisasi Januari 2026 menunjukkan inflasi 3,55 persen, kurs penutupan sekitar Rp16.925 per dolar AS, dan ICP Januari 2026 sebesar USD64,41 per barel. Artinya, sebelum eskalasi penuh di Timur Tengah pun, ruang kebijakan Indonesia sesungguhnya sudah bekerja dalam lingkungan yang sensitif terhadap kurs, harga minyak, dan dinamika global. ([Kementerian Keuangan Media](#))

Dari sisi eksternal, ketahanan Indonesia juga masih terlihat cukup baik. Bank Indonesia melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia pada triwulan IV 2025 mencatat surplus USD6,1 miliar. Defisit transaksi berjalan pada periode itu hanya USD2,5 miliar atau 0,7 persen dari PDB, dan sepanjang 2025 defisit transaksi berjalan tercatat sangat kecil, sekitar USD1,5 miliar atau 0,1 persen dari PDB. Pada akhir Februari 2026, cadangan devisa Indonesia masih sebesar USD151,9 miliar, setara 6,1 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dengan demikian, Indonesia tidak memasuki krisis dari posisi kosong; ada bantalan stabilitas yang nyata. ([Bank Indonesia](#))

Namun bantalan itu tidak berarti kebal. BPS mencatat bahwa pada Januari 2026 Indonesia memang masih membukukan surplus perdagangan USD0,95 miliar, tetapi sektor migas mengalami defisit USD2,27 miliar. Pada saat yang sama, impor Januari 2026 naik 18,21 persen secara tahunan. Jadi, struktur eksternal Indonesia sesungguhnya memperlihatkan paradoks klasik: neraca keseluruhan masih sehat, tetapi

ketergantungan pada energi impor tetap menjadi titik lemah yang mudah terekspos ketika harga minyak melonjak dan jalur pasok terganggu. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Titik lemah itu tampak lebih jelas ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa seperempat impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah, sementara 30 persen impor LPG Indonesia juga datang dari kawasan yang sama. Bahkan, pada awal Maret 2026, dua kapal milik Pertamina dilaporkan tertahan di Selat Hormuz. Fakta ini penting, sebab ia menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan semata harga, melainkan juga kepastian fisik pasokan. Selama pasokan masih mengalir, Indonesia berhadapan dengan harga yang mahal; ketika pasokan terganggu, Indonesia berhadapan dengan risiko kelangkaan. ([Reuters](#))

Sebagai respons, pemerintah mulai mengalihkan sebagian impor minyak mentah ke Amerika Serikat. ANTARA melaporkan bahwa impor crude dari AS sudah mulai dilakukan secara bertahap, sambil pemerintah menyiapkan perluasan kapasitas penyimpanan minyak dari sekitar 25–26 hari menjadi 90 hari sesuai standar internasional. Dari sudut pandang geopolitik ekonomi, kebijakan ini penting karena menandai pergeseran dari strategi “mencari harga terbaik” ke strategi “mencari keamanan pasokan”. Dalam situasi damai, efisiensi harga bisa menjadi prioritas; dalam situasi perang, keamanan pasokan menjadi nilai ekonomi yang sama pentingnya. ([Antara News](#))

Meski demikian, kapasitas cadangan Indonesia masih menggambarkan keterbatasan. ESDM pada Desember 2025 menyebut rata-rata stok BBM nasional sekitar 24 hari, di atas batas minimum 18 hari. Ini cukup untuk menghadapi gangguan jangka sangat pendek, terutama menjelang hari besar keagamaan, tetapi jelas belum setara dengan ketahanan energi strategis negara-negara besar yang memiliki cadangan puluhan hingga ratusan hari. Karena itu, dalam krisis berkepanjangan, persoalan

Indonesia tidak lagi hanya terletak pada harga beli energi, tetapi pada durasi kemampuan bertahan tanpa gangguan pasokan. ([Kementerian ESDM RI](#))

Saluran transmisi pertama dari gejolak Timur Tengah ke ekonomi Indonesia adalah harga minyak dunia. Reuters melaporkan bahwa Brent sempat menyentuh USD119,50 per barel sebelum bergerak turun, dan tetap berada di kisaran yang sangat tinggi relatif terhadap asumsi APBN Indonesia. IEA bahkan mengeluarkan 400 juta barel cadangan strategis untuk meredam lonjakan harga dan gangguan pasokan. Ini berarti pasar melihat konflik bukan sebagai insiden sesaat, melainkan sebagai ancaman sistemik terhadap kelancaran rantai pasok energi global. ([Reuters](#))

Begitu harga minyak global naik, Indonesia langsung menghadapi tekanan ganda. Pertama, biaya impor crude dan LPG meningkat. Kedua, pemerintah harus memutuskan apakah kenaikan itu diteruskan ke konsumen atau diserap melalui subsidi dan kompensasi. Karena sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha kecil masih sangat sensitif terhadap harga BBM, kebijakan energi di Indonesia tidak pernah murni ekonomi; ia selalu juga merupakan kebijakan sosial dan politik. Itulah sebabnya, gejolak Timur Tengah hampir otomatis berubah menjadi dilema kebijakan domestik. ([Reuters](#))

Dalam konteks Indonesia, kenaikan harga minyak tidak selalu langsung terlihat di pompa bensin. Sering kali pemerintah memilih menahan harga eceran untuk menjaga daya beli dan stabilitas sosial. Tetapi penahanan harga ini bukan tanpa biaya. Biayanya berpindah ke APBN, ke kompensasi untuk Pertamina dan PLN, atau ke pengorbanan belanja lain yang semestinya bisa dipakai untuk pembangunan. Dengan demikian, ketika konsumen merasa "harga belum naik", sesungguhnya beban hanya bergeser dari rumah tangga ke fiskus. ([Reuters](#))

Saluran transmisi kedua adalah fiskal. Indonesia menganggarkan Rp381,3 triliun pada 2026 untuk subsidi energi dan kompensasi kepada Pertamina serta PLN, dengan asumsi harga minyak rata-rata USD70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS. Masalahnya, konflik Timur Tengah mendorong minyak menembus USD100 per barel, sementara rupiah juga tertekan. Artinya, dua asumsi dasar fiskal—harga minyak dan nilai tukar—terkena tekanan pada saat yang sama. Dalam teori ekonomi publik, inilah bentuk tekanan fiskal yang paling berat: ketika shock datang bersamaan di sisi harga dan kurs. ([Reuters](#))

Kementerian Keuangan sendiri memberi sinyal yang cukup jelas. Reuters mengutip bahwa jika harga minyak berada di kisaran USD90–92 per barel, defisit APBN dapat melebar hingga sekitar 3,6 persen dari PDB, di atas batas legal 3 persen. Pemerintah menyatakan akan melakukan penyesuaian belanja agar tetap mematuhi batas defisit. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak bukan sekadar isu sektor energi; ia berpotensi memaksa realokasi anggaran nasional, termasuk kemungkinan menunda atau mengurangi belanja lain yang tidak dianggap prioritas tertinggi. ([Reuters](#))

Lebih jauh, Wakil Menteri Keuangan Junda Agung menjelaskan bahwa setiap kenaikan USD1 pada ICP berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun. Angka ini sangat penting secara analitis. Ia memberi kita cara untuk menghitung skala risiko secara cepat. Jika deviasi harga minyak dari asumsi APBN berlangsung lama, maka dampaknya terhadap defisit bukan lagi marjinal, melainkan struktural. Dalam situasi seperti ini, fiskal Indonesia harus memilih antara tiga jalan yang sama-sama berat: memperlebar subsidi, menaikkan harga domestik, atau memangkas pos belanja lain. (kemenkeu.go.id)

Di sinilah terlihat bahwa APBN Indonesia bekerja bukan hanya sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga sebagai shock absorber geopolitik. Ketika Timur Tengah bergejolak, APBN dipaksa menahan gelombang dari

luar agar tidak segera menghantam masyarakat. Tetapi kemampuan APBN sebagai penyangga tetap memiliki batas. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar kemungkinan bantalan fiskal berubah menjadi sumber tekanan fiskal. Maka, yang semula tampak sebagai perlindungan sosial dapat berubah menjadi problem keberlanjutan anggaran. ([Reuters](#))

Saluran transmisi ketiga adalah nilai tukar dan kebijakan moneter. Dalam asumsi APBN 2026, kurs dipatok Rp16.500 per dolar AS, tetapi realisasi pada 20 Februari 2026 sudah menunjukkan kurs akhir periode sekitar Rp16.925 dan year-to-date sekitar Rp16.842. Dokumen APBN Kita juga secara eksplisit menyatakan bahwa rupiah dipengaruhi ketidakpastian global, dinamika kebijakan AS, sikap The Fed yang lebih hawkish, dan sentimen pasar terhadap ekonomi domestik. Dengan kata lain, rupiah memang sudah berada dalam zona sensitif bahkan sebelum konflik Timur Tengah menjadi lebih luas. ([Kementerian Keuangan Media](#))

Bank Indonesia merespons kondisi itu dengan menahan BI-Rate di 4,75 persen pada rapat 18–19 Februari 2026. BI menegaskan fokus kebijakan saat ini adalah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Untuk tujuan itu, BI memperkuat intervensi di pasar NDF offshore, pasar spot dan DNDF domestik, serta melakukan pembelian SBN di pasar sekunder. Ini menggambarkan bahwa shock energi bukan hanya persoalan komoditas, tetapi segera menjalar ke pasar uang, pasar obligasi, dan sentimen portofolio. ([Bank Indonesia](#))

Reuters kemudian melaporkan bahwa perang di Timur Tengah makin menekan rupiah dan menutup ruang BI untuk melonggarkan suku bunga lebih cepat. Rupiah bahkan sempat menyentuh rekor terendah sekitar Rp16.990 per dolar AS, sementara ekspektasi pemotongan suku bunga menjadi tertunda. Dari sudut pandang dunia usaha, ini penting karena biaya energi yang naik bisa bertemu dengan biaya pembiayaan yang tetap tinggi. Perusahaan menghadapi tekanan dari dua sisi

sekaligus: ongkos produksi meningkat, sementara ongkos dana tidak cepat turun. ([Reuters](#))

Saluran keempat adalah inflasi dan daya beli. BPS mencatat inflasi tahunan Februari 2026 sebesar 4,76 persen, jauh lebih tinggi daripada asumsi APBN 2,5 persen dan berada di atas sasaran BI 1,5–3,5 persen. Kenaikan ini tidak boleh dibaca secara sempit hanya sebagai statistik bulanan. Ia menunjukkan bahwa ruang inflasi Indonesia sudah menegang. Dalam situasi seperti ini, tambahan shock dari energi akan lebih mudah menular ke komponen lain, terutama transportasi, distribusi barang, dan harga pangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dokumen APBN Kita menyebut inflasi volatile food dikendalikan melalui intervensi harga dan penguatan peran Bulog, sementara administered prices dijaga melalui kebijakan harga energi untuk menjaga daya beli. Kalimat ini sesungguhnya menunjukkan inti masalah Indonesia: kestabilan inflasi tidak hanya bergantung pada panen atau distribusi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengelola harga energi. Jika harga energi bergerak liar, maka biaya angkut, biaya pendinginan, biaya produksi, dan biaya distribusi ikut terdorong. Akhirnya, inflasi pangan dan biaya hidup masyarakat sulit dijaga. ([Kementerian Keuangan Media](#))

Di titik ini, dilema kebijakan menjadi sangat nyata. Bila pemerintah mempertahankan harga energi domestik, APBN menanggung beban besar. Bila pemerintah menaikkan harga domestik, inflasi dan keresahan sosial berpotensi meningkat. Narasi yang paling realistis bukanlah mencari solusi tanpa biaya, melainkan memilih jalur pembagian beban yang paling dapat diterima. Dalam ekonomi politik Indonesia, itu berarti kombinasi antara stabilisasi harga terbatas, subsidi yang lebih terarah, dan komunikasi publik yang meyakinkan. ([Reuters](#))

Saluran kelima adalah sektor eksternal. Indonesia memang masih memiliki surplus perdagangan dan cadangan devisa yang kuat, tetapi struktur transaksi berjalannya memperlihatkan sensitivitas terhadap

migas. BI menyebut pada triwulan IV 2025 neraca perdagangan migas mencatat defisit yang lebih tinggi sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Ini berarti ketika ekonomi tumbuh, kebutuhan energi juga meningkat, dan bila pasokan domestik tidak mencukupi maka defisit migas cenderung melebar. Dalam situasi harga minyak tinggi, pola ini menjadi lebih berat. ([Bank Indonesia](#))

BPS juga menunjukkan bahwa pada Januari 2026 surplus perdagangan keseluruhan Indonesia hanya USD0,95 miliar, karena surplus nonmigas USD3,22 miliar dikompensasi oleh defisit migas USD2,27 miliar.

Gambaran ini sangat relevan. Ia menunjukkan bahwa surplus perdagangan Indonesia tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa ekonomi eksternal aman sepenuhnya. Surplus itu masih dapat terkikis cepat ketika biaya impor energi melonjak. Maka, dalam shock energi global, pertanyaan penting bukan “apakah Indonesia surplus dagang?”, melainkan “seberapa cepat defisit migas menggerus surplus nonmigas?” ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Cadangan devisa sebesar USD151,9 miliar memang memberi waktu dan ruang bernapas. Ia memungkinkan BI melakukan stabilisasi dan menjaga kepercayaan pasar. Tetapi cadangan devisa adalah bantalan, bukan obat permanen. Bila shock pasokan dan harga berlangsung terlalu lama, penggunaan cadangan hanya mengulur waktu penyesuaian. Karena itu, ketahanan eksternal Indonesia harus dibaca sebagai kapasitas untuk menyerap benturan awal, bukan jaminan bahwa guncangan tidak akan berdampak pada pertumbuhan dan kesejahteraan. ([Bank Indonesia](#))

Saluran keenam—dan sering kali luput dari perhatian—adalah dampak pada rantai pasok industri nonmigas. Reuters melaporkan bahwa Indonesia mengimpor sekitar 75 persen sulfur yang dibutuhkan industri nikelnya dari Timur Tengah. Sulfur digunakan untuk menghasilkan asam sulfat, bahan penting dalam proses HPAL untuk pemurnian nikel. Stok sulfur di pabrik-pabrik HPAL disebut rata-rata hanya cukup untuk satu

hingga dua bulan konsumsi, sementara harga sulfur sudah tinggi dan naik lagi 10–15 persen sejak konflik. Ini berarti gangguan Timur Tengah tidak hanya memukul pom bensin, tetapi juga dapat mengganggu proyek hilirisasi yang selama ini diposisikan sebagai kebanggaan strategi industri Indonesia. ([Reuters](#))

Dampak ini penting karena nikel adalah salah satu simpul utama Indonesia dalam rantai nilai kendaraan listrik global. Bila sulfur langka atau mahal, biaya produksi meningkat, output bisa dipangkas, dan keunggulan kompetitif hilirisasi dapat tertekan. Dengan demikian, gejolak energi di Timur Tengah merembet ke sektor yang sepiintas tampak tidak berkaitan langsung, yakni industri logam dan baterai. Ini pelajaran geopolitik ekonomi yang penting: dalam ekonomi modern, ketergantungan strategis tidak selalu berbentuk impor minyak; ia juga bisa berbentuk ketergantungan pada input kimia yang menopang industri masa depan. ([Reuters](#))

Gangguan pelayaran dan risiko keamanan di jalur Hormuz juga mengandung efek logistik yang lebih luas. Bahkan ketika minyak masih bisa dialihkan melalui rute alternatif, biaya pengapalan, asuransi, dan waktu tempuh cenderung naik. Dalam konteks Indonesia—negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut dan distribusi antarpulau—kenaikan biaya logistik mudah menjalar ke harga barang domestik. Jadi, dampak gejolak Timur Tengah tidak hanya hadir melalui komoditas energi itu sendiri, tetapi juga melalui naiknya ongkos memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah bentuk inflasi tidak langsung yang sering terasa luas di masyarakat. ([Reuters](#))

Bila kita turunkan analisis ini ke tingkat sektor, maka transportasi adalah sektor pertama yang merasakan tekanan. Perusahaan penerbangan menghadapi avtur yang lebih mahal. Angkutan darat menghadapi kenaikan biaya solar dan biaya perawatan. Distribusi antarpulau menghadapi ongkos pengiriman yang lebih tinggi. Dalam narasi sehari-

hari, ini berarti tiket menjadi mahal, distribusi barang lebih lambat atau lebih mahal, dan margin usaha logistik menyempit. Pada akhirnya, rumah tangga membayar dalam bentuk harga yang lebih tinggi atau layanan yang lebih mahal. ([Reuters](#))

Sektor pangan juga sangat rentan. Bukan karena Indonesia harus mengimpor seluruh bahan pangan dari Timur Tengah, melainkan karena sistem pangan domestik bergantung pada energi di setiap tahap: traktor dan mesin, pengangkutan dari sentra produksi ke pasar, cold chain, sampai distribusi eceran. Itulah sebabnya dokumen fiskal pemerintah mengaitkan kestabilan volatile food dengan intervensi harga dan dukungan kebijakan energi. Dalam konteks Indonesia, harga cabai, beras, ayam, dan ikan sering kali tidak hanya dipengaruhi panen, tetapi juga ongkos distribusi. Ketika energi mahal, stabilitas pangan menjadi lebih sulit dijaga. ([Kementerian Keuangan Media](#))

Sektor manufaktur menghadapi situasi yang lebih kompleks. Di satu sisi, pelemahan rupiah dapat memberi keuntungan sementara bagi eksportir berbasis dolar. Di sisi lain, bahan baku impor, energi, dan biaya logistik menjadi lebih mahal. Sektor yang padat energi dan padat impor akan lebih tertekan dibanding sektor yang basis input-nya domestik. Karena itu, efek akhir terhadap manufaktur Indonesia tidak seragam. Namun secara umum, gejolak energi global cenderung mengurangi kepastian usaha, menekan margin, dan menunda keputusan investasi baru. ([Reuters](#))

Bagi rumah tangga, efek yang paling cepat terasa biasanya bukan bahasa makro seperti "current account" atau "yield SBN", melainkan biaya hidup. Keluarga berpendapatan menengah dan rendah akan mulai merasakan tekanan melalui ongkos perjalanan, harga makanan, dan berkurangnya ruang konsumsi non-pokok. Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan ekonomi bisa tetap terlihat positif secara agregat, tetapi kualitas kesejahteraan sehari-hari menurun. Karena itu, gejolak energi

harus dibaca tidak hanya sebagai risiko terhadap PDB, tetapi juga terhadap persepsi kesejahteraan masyarakat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sini kita dapat membayangkan tiga skenario. Skenario pertama adalah shock pendek. Dalam skenario ini, gangguan pasokan mereda dalam beberapa minggu, jalur alternatif Saudi dan UEA membantu, dan pelepasan cadangan IEA cukup menenangkan pasar. Jika ini terjadi, Indonesia masih mungkin menahan dampak terutama melalui subsidi, stabilisasi rupiah, dan pengelolaan stok. Efeknya terasa, tetapi tidak sampai mengubah arah pertumbuhan secara drastis. ([Reuters](#))

Skenario kedua adalah shock menengah, misalnya satu sampai tiga bulan. Dalam situasi ini, tekanan pada fiskal membesar, ekspektasi inflasi mengeras, BI menunda pelonggaran lebih lama, dan defisit migas berpotensi semakin menggerus surplus perdagangan. Industri yang bergantung pada input impor strategis, seperti sulfur untuk nikel, mulai menghadapi gangguan nyata. Pada fase inilah gejolak eksternal berubah menjadi perlambatan domestik yang lebih terasa. ([Reuters](#))

Skenario ketiga adalah shock berkepanjangan. Bila konflik berlarut, penataan ulang impor energi Indonesia akan menjadi keharusan, bukan pilihan. Pemerintah harus melakukan realokasi anggaran, mempercepat kebijakan substitusi impor energi, serta mungkin meninjau ulang prioritas belanja dan proyek. Dalam skenario ini, persoalannya tidak lagi sekadar "mengelola krisis", tetapi "mengubah arsitektur ketahanan energi nasional". Krisis berkepanjangan akan memaksa Indonesia bergerak dari respons taktis ke reformasi strategis. ([Antara News](#))

Lalu apa yang seharusnya dilakukan Indonesia? Pertama, dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan keamanan pasokan lebih dulu daripada mengejar harga termurah. Diversifikasi impor ke AS dan sumber non-Timur Tengah harus dipercepat, sambil memastikan jalur diplomatik dan logistik untuk kapal-kapal Indonesia tetap terbuka. Stok

24 hari cukup untuk shock pendek, tetapi dalam krisis geopolitik, yang dibutuhkan bukan hanya stok operasional, melainkan stok strategis. Karena itu target peningkatan kapasitas penyimpanan menuju 90 hari perlu diperlakukan sebagai prioritas keamanan nasional, bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. ([Antara News](#))

Kedua, koordinasi fiskal dan moneter harus dibuat jauh lebih presisi. Fiskal tidak mungkin terus menyerap semua kenaikan harga secara membabi buta, dan moneter tidak bisa sendirian menstabilkan rupiah bila tekanan berasal dari sisi komoditas dan geopolitik. Maka jalan yang lebih rasional adalah subsidi yang lebih terarah, perlindungan khusus bagi kelompok rentan, serta penajaman belanja agar ruang fiskal tidak habis untuk menutup shock jangka pendek. Sensitivitas defisit sebesar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan USD1 ICP menunjukkan betapa pentingnya disiplin prioritas dalam APBN. ([kemenkeu.go.id](#))

Ketiga, Indonesia perlu mempercepat substitusi impor energi yang realistis. Dalam hal ini, biodiesel bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan instrumen geopolitik ekonomi. ESDM melaporkan bahwa realisasi B40 pada 2025 mencapai 14,2 juta kL, menurunkan impor solar sekitar 3,3 juta kL, menghemat devisa Rp130,21 triliun, dan menjadi basis bagi target penghentian impor solar pada 2026 serta uji coba B50 pada semester pertama 2026. Ini sangat penting. Di tengah gejolak Timur Tengah, setiap liter substitusi domestik berarti pengurangan kerentanan eksternal. ([Kementerian ESDM RI](#))

Keempat, transisi energi harus dibaca ulang sebagai strategi ketahanan, bukan semata agenda dekarbonisasi. ESDM menyebut bauran energi terbarukan Indonesia pada 2025 baru mencapai 15,75 persen, sementara target nasional untuk 2025 ditetapkan 23 persen. Kesenjangan ini memberi pelajaran yang tegas: selama bauran energi domestik masih terlalu bergantung pada sumber yang rentan terhadap harga global dan jalur maritim geopolitik, maka setiap krisis di luar negeri akan lebih

mudah menjalar ke dalam negeri. Energi terbarukan, efisiensi energi, elektrifikasi transportasi, dan penguatan jaringan listrik domestik bukan lagi proyek idealistik, tetapi bagian dari pertahanan ekonomi nasional. ([Kementerian ESDM RI](#))

Kelima, kebijakan industri harus memasukkan perspektif supply-chain security. Kasus sulfur untuk industri nikel memperlihatkan bahwa hilirisasi yang kuat bukan hanya soal membangun smelter, melainkan juga memastikan bahan penolong strategis tidak terlalu terkonsentrasi dari satu kawasan geopolitik. Pemerintah dan dunia usaha perlu memetakan input kritis, membangun opsi pasokan alternatif, dan bila memungkinkan mengembangkan kapasitas domestik atau regional untuk bahan-bahan pendukung proses industri. Di era geopolitik yang semakin cair, daya saing industri tidak cukup ditopang oleh upah murah atau insentif fiskal; ia juga bergantung pada ketahanan rantai pasok. ([Reuters](#))

Keenam, komunikasi publik harus dikelola dengan jujur tetapi menenangkan. Dalam krisis energi, kepanikan pasar dan kepanikan publik bisa sama berbahayanya dengan kelangkaan fisik itu sendiri. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kondisi stok, strategi impor, skenario subsidi, dan kebijakan mitigasi. Di sisi lain, lembaga seperti BI, Kemenkeu, ESDM, Pertamina, dan Bulog harus memberi sinyal yang konsisten agar pelaku usaha dapat membuat keputusan tanpa spekulasi berlebihan. Stabilitas ekonomi sering kali sangat ditentukan oleh kualitas ekspektasi. ([Bank Indonesia](#))

Pada akhirnya, gejolak Timur Tengah mengajarkan satu hal yang mendasar: dalam ekonomi yang terhubung erat, energi adalah jembatan antara perang dan dapur rumah tangga. Apa yang tampak sebagai konflik regional dapat berubah menjadi kenaikan biaya hidup, tekanan APBN, pelemahan rupiah, dan ketidakpastian investasi di Indonesia. Di sini terlihat bahwa geopolitik bukan abstraksi bagi ekonom, dan

ekonomi bukan sekadar angka bagi diplomat. Keduanya bertemu pada harga energi, lalu menjalar ke seluruh sendi kehidupan nasional.

([Reuters](#))

Karena itu, jawaban Indonesia tidak boleh bersifat sesaat. Menahan harga, menambah subsidi, atau mengalihkan impor memang penting untuk jangka pendek. Tetapi pelajaran yang lebih besar adalah perlunya membangun ketahanan energi yang lebih dalam: cadangan strategis yang memadai, diversifikasi sumber impor, substitusi energi melalui biofuel, percepatan energi terbarukan, efisiensi logistik, dan pengamanan rantai pasok industri. Bila langkah-langkah ini dikerjakan secara konsisten, maka gejolak Timur Tengah di masa depan tidak akan lagi secara otomatis mengguncang ekonomi Indonesia dengan skala yang sama. Di situlah geopolitik energi diubah menjadi agenda kedaulatan ekonomi. ([Antara News](#))

Berikut **glosarium** dan **daftar pustaka gaya APA 7** yang diselaraskan dengan naskah “**Ketika Timur Tengah Bergejolak: Dampak Geopolitik Energi terhadap Ekonomi Indonesia.**”

Glosarium

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Dalam konteks krisis energi, APBN berfungsi sebagai instrumen stabilisasi untuk menyerap

guncangan harga minyak, subsidi energi, dan kompensasi kepada BUMN energi. ([Kementerian Keuangan Media](#))

Administered prices

Kelompok harga barang dan jasa yang perubahannya sangat dipengaruhi atau ditetapkan oleh kebijakan pemerintah, seperti BBM tertentu, listrik, dan tarif-tarif tertentu. Dalam situasi geopolitik energi, komponen ini penting karena menjadi jalur transmisi antara harga energi global dan inflasi domestik. ([Kementerian Keuangan Media](#))

BI-Rate

Suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi sinyal utama stance kebijakan moneter. Dalam periode gejolak global, BI-Rate digunakan bersama intervensi valas dan instrumen pasar untuk menjaga stabilitas rupiah serta ekspektasi inflasi. ([Bank Indonesia](#))

Bauran energi

Komposisi berbagai sumber energi dalam sistem energi nasional, baik fosil maupun energi baru terbarukan. Bauran energi yang lebih beragam umumnya meningkatkan ketahanan terhadap guncangan harga dan pasokan dari luar negeri. ([Kementerian ESDM RI](#))

Biodiesel B40/B50

Campuran bahan bakar diesel dengan biodiesel berbasis sawit sebesar 40 persen atau 50 persen. Kebijakan ini dipakai Indonesia untuk menekan impor solar, menghemat devisa, dan memperkuat ketahanan energi domestik. ([Kementerian ESDM RI](#))

Cadangan devisa

Aset valuta asing yang dikelola bank sentral untuk mendukung stabilitas eksternal, membiayai impor, serta menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 dilaporkan tetap tinggi dan setara lebih dari enam bulan impor.

([Bank Indonesia](#))

Current account / transaksi berjalan

Komponen neraca pembayaran yang mencatat perdagangan barang, jasa, pendapatan primer, dan transfer sekunder antara Indonesia dan luar negeri. Defisit transaksi berjalan yang kecil menandakan tekanan eksternal relatif terkendali, meski defisit migas tetap menjadi titik rawan.

([Bank Indonesia](#))

Defisit migas

Kondisi ketika nilai impor minyak dan gas lebih besar daripada nilai ekspor migas. Dalam konteks Indonesia, defisit migas dapat menggerus surplus perdagangan nonmigas ketika harga minyak dunia meningkat.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Diversifikasi pasokan energi

Strategi untuk tidak bergantung pada satu kawasan, satu negara, atau satu jalur logistik dalam memenuhi kebutuhan energi. Pemerintah Indonesia mulai mengalihkan sebagian impor minyak mentah ke Amerika Serikat sebagai respons terhadap risiko di Timur Tengah.

([Kementerian ESDM RI](#))

Hormuz / Selat Hormuz

Jalur pelayaran strategis di kawasan Teluk yang menghubungkan produsen energi Timur Tengah dengan pasar global. Gangguan di selat ini dapat memengaruhi sekitar seperlima aliran minyak dunia dan memicu lonjakan harga energi internasional. ([Kementerian ESDM RI](#))

ICP (Indonesian Crude Price)

Harga minyak mentah Indonesia yang digunakan sebagai salah satu asumsi penting dalam perencanaan fiskal, termasuk perhitungan subsidi energi dan penerimaan negara terkait sektor energi. ([Kementerian](#)

[Keuangan Media](#))

IEA (International Energy Agency)

Lembaga internasional yang memantau pasar energi global dan dapat

mengoordinasikan pelepasan cadangan strategis dalam kondisi gangguan pasokan besar. Dalam krisis Maret 2026, IEA menyatakan terjadi salah satu disrupsi pasokan minyak terbesar dalam sejarah modern. ([Reuters](#))

Inflasi volatile food

Inflasi pada kelompok pangan berkejolak, yang umumnya dipengaruhi musim, distribusi, cuaca, dan biaya logistik. Kenaikan harga energi dapat memperkuat tekanan pada volatile food karena meningkatkan ongkos angkut dan distribusi. ([Kementerian Keuangan Media](#))

Ketahanan energi

Kemampuan negara menjamin ketersediaan energi secara cukup, terjangkau, dan berkelanjutan, termasuk dalam kondisi guncangan geopolitik. Ketahanan energi mencakup stok, infrastruktur penyimpanan, diversifikasi sumber, dan penguatan energi domestik. ([Kementerian ESDM RI](#))

LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Gas minyak cair yang banyak digunakan rumah tangga dan sektor usaha kecil. Ketergantungan impor LPG dari Timur Tengah membuat Indonesia rentan terhadap gangguan pasokan dan lonjakan harga global. ([Reuters](#))

Neraca pembayaran

Catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi antara Indonesia dan dunia internasional dalam periode tertentu, mencakup transaksi berjalan, transaksi modal dan finansial, serta perubahan cadangan devisa. ([Bank Indonesia](#))

Rantai pasok strategis

Jaringan pasokan bahan baku, bahan penolong, logistik, dan distribusi yang menopang sektor-sektor penting. Dalam kasus Indonesia, pasokan sulfur untuk industri nikel menjadi contoh bagaimana konflik energi dapat merembet ke hilirisasi mineral. ([Reuters](#))

Rupiah depreciation / pelemahan rupiah

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS. Dalam krisis energi global, pelemahan rupiah memperbesar biaya impor energi dan tekanan fiskal. ([Bank Indonesia](#))

Subsidi energi dan kompensasi energi

Dukungan fiskal pemerintah untuk menjaga harga energi domestik tetap terjangkau. Instrumen ini dapat melindungi daya beli dalam jangka pendek, tetapi sekaligus meningkatkan beban APBN ketika harga minyak dan kurs bergerak tidak sesuai asumsi. ([Reuters](#))

Surplus perdagangan

Kondisi ketika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Indonesia masih mencatat surplus perdagangan pada Januari 2026, tetapi defisit migas memperlihatkan bahwa ketahanan eksternal tetap sensitif terhadap shock energi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Transisi energi

Peralihan bertahap dari sistem energi yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil menuju sistem yang lebih efisien, rendah emisi, dan berbasis energi terbarukan. Dalam tulisan ini, transisi energi dibaca bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai strategi ketahanan ekonomi nasional. ([Kementerian ESDM RI](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026, February 27). *The year-on-year (y-on-y) headline inflation in February 2026 was recorded at 4.76 percent.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Rudy C Tarumingkeng: *Ketika Timur Tengah Bergejolak: Dampak Geopolitik Energi terhadap Ekonomi Indonesia*

Badan Pusat Statistik. (2026, March 2). *Exports and imports of Indonesia in January 2026 reached USD22.16 billion and USD21.20 billion.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, February 24). *Neraca pembayaran Indonesia triwulan IV 2025 surplus dan menopang ketahanan eksternal.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, February 26). *BI-Rate tetap 4,75%: Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, March 6). *Cadangan devisa Februari 2026 tetap tinggi.* ([Bank Indonesia](#))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026, January 9). *Capaian positif tahun 2025, negara hadir penuhi kebutuhan energi masyarakat.* ([Kementerian ESDM RI](#))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026, January 23). *Mandatori biodiesel perkuat ketahanan energi, pemerintah targetkan stop impor solar 2026.* ([Kementerian ESDM RI](#))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026, March 3). *Menteri ESDM pimpin sidang DEN, pemerintah jaga ketahanan energi di tengah gejolak global.* ([Kementerian ESDM RI](#))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026). *Realisasi mandatori B40 berhasil tekan impor solar, Indonesia targetkan bebas impor di tahun 2026.* ([Kementerian ESDM RI](#))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (n.d.). *Kurangi ketergantungan impor, pemerintah perkuat kedaulatan energi nasional.* ([Kementerian ESDM RI](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan RAPBN TA 2026.* ([Kementerian Keuangan Media](#))

Rudy C Tarumingkeng: Ketika Timur Tengah Bergejolak: Dampak Geopolitik Energi terhadap Ekonomi Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, February 23). *Publikasi web konferensi pers APBN Kita Februari 2026*. ([Kementerian Keuangan Media](#))

Reuters. (2026, March 3). *Indonesia to import more crude oil from US as Middle East conflict escalates, minister says*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 6). *Gulf disruption squeezes Indonesia nickel makers' sulphur supply*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 9). *Indonesia will absorb shock from soaring oil prices using state budget*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 9). *Indonesia may revive B50 biodiesel mix plan as oil prices soar*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 12). *Bank Indonesia to hold key rate at 4.75% on March 17 as Middle East war weighs on rupiah: Reuters poll*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 12). *World faces largest-ever oil supply disruption on Middle East war, IEA says*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 12). *ASEAN ministers to hold meetings to address Middle East crisis*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 12). *Oil settles up 9% as Iran vows to keep Strait of Hormuz closed*. ([Reuters](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 13 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a4f9fd-cfcc-839c-b279-0ae0ae0fd937>